

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum dan batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam menjalankan fungsi pemerintahan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta implikasi yuridis terhadap batas kewenangannya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru ini menimbulkan dualisme kedudukan hukum yang mengaburkan supremasi sipil, serta inkonsistensi norma vertikal dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 terkait batas kewenangan. Implikasi yuridis dari kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme hukum berupa benturan yurisdiksi peradilan dan rangkap anggaran (double funding), pelanggaran profesionalisme militer akibat masuknya TNI aktif ke ranah korporasi BUMN, serta kerusakan sistem merit manajemen ASN melalui pengangkatan non-selektif. Seluruh dampak tersebut pada akhirnya berakumulasi pada melemahnya prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Kata kunci: Prajurit TNI, Jabatan Sipil, Kewenangan.

ABSTRACT

The problem in this research is the expansion of civilian positions for active-duty TNI soldiers following the enactment of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI). This raises issues regarding the legal standing and limits of the authority of active-duty TNI soldiers in carrying out civil government functions. This research aims to analyze the legal standing of active-duty TNI soldiers in civilian positions and the legal implications for the limits of their authority following the enactment of Law Number 3 of 2025 concerning the TNI.

This research uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and historical approach. Data collection was conducted through a literature review of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that this new regulation creates a dualism in legal standing that obscures civilian supremacy and inconsistencies in vertical norms with MPR Decree Number VII/MPR/2000 concerning limits of authority. The legal implications of this policy have resulted in legal dualism in the form of conflicting judicial jurisdictions and double funding, a violation of military professionalism due to the entry of active-duty TNI personnel into the realm of state-owned enterprises (SOEs), and a breakdown in the merit system of civil servant management through non-selective appointments. All of these impacts ultimately culminate in a weakening of the principle of civilian supremacy in democratic governance.

Keywords: TNI Soldiers, Civilian Positions, Authority.